

**RINCIAN OUTPUT PRIORITAS NASIONAL
PAGU ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2026**

KODE	UKE I / PROGRAM / KEGIATAN / KRO / RO	TARGET		PAGU ALOKASI (Rp.)	UKE II
		VOLUME	SATUAN		
KEMENTERIAN DALAM NEGERI				881.303.786.000	
010.CM	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa			532.878.490.000	
Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan				235.024.635.000	
1237	Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah			60.242.855.000	
1237.PBL	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan				
1237.PBL.001	Rekomendasi Pelaksanaan Model Ideal Kewenangan dan Kelembagaan GWPP	1	Rekomendasi Kebijakan	7.426.800.000	Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama
1237.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah				
1237.UBA.001	Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	20	Daerah (Prov/Kab/Kota)	41.265.882.000	Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama
1237.UBA.002	Daerah yang difasilitasi dalam penguatan peran kecamatan dalam koordinasi vertikal dan horizontal	207	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.300.000.000	Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama
1237.UBA.003	Daerah yang melaksanakan kerjasama daerah dalam penyediaan pelayanan publik	17	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.000.000.000	Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama
1237.UBA.004	Daerah yang diterapkan sebagai pilot kerja sama antar daerah untuk mendukung pusat pertumbuhan di Wilayah Metropolitan	4	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.000.000.000	Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama
1237.UBA.005	Daerah yang menerapkan PTSP berbasis OSS-RBA (Online Single Submission Risk Based Approach) dalam perizinan berusaha	136	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.000.000.000	Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama
1237.UBA.006	Daerah yang dikuatkan SDM dan Kelembagaan DTMPSTP nya untuk mendukung iklim investasi yang kondusif	143	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.500.000.000	Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama
1237.UBA.007	Daerah yang ditingkatkan pelimpahan kewenangan perizinan kepada DPMPSTP	155	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.505.000.000	Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama
1237.UBA.008	Dukungan Penguatan Terhadap Tata Kelola Koperasi Merah Putih Kelurahan/Desa	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	4.245.173.000	Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama
1241	Pembinaan Kawasan, Perkotaan, batas negara, batas wilayah, dan toponimi			35.730.000.000	
1241.PBL	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan				
1241.PBL.001	Daerah yang difasilitasi dalam penyelesaian batas daerah	50	Rekomendasi Kebijakan	6.000.000.000	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah
1241.PBL.002	Rekomendasi penyelesaian batas kewenangan pengelolaan sumber daya alam di laut provinsi	9	Rekomendasi Kebijakan	3.000.000.000	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah
1241.PEC	Kerja sama				
1241.PEC.001	Penguatan Kerja Sama Pembangunan lintas batas negara di bidang ekonomi, sosial, dan budaya	2	Kesepakatan	10.550.000.000	Direktorat Kawasan, Perkotaan, dan Batas Negara
1241.PEC.002	Penyelesaian permasalahan segmen batas wilayah negara, penegasan, dan pemeliharaan batas negara	3	Kesepakatan	1.350.000.000	Direktorat Kawasan, Perkotaan, dan Batas Negara
1241.PEC.003	K/L yang mengintegrasikan kode, data wilayah administrasi pemerintahan dan pulau	16	Kesepakatan	4.000.000.000	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah
1241.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah				
1241.UBA.001	Daerah yang melakukan penilaian Indeks Maturasi Perkotaan lintas K/L secara terpadu di Wilayah Metropolitan	10	Daerah (Prov/Kab/Kota)	2.550.000.000	Direktorat Kawasan, Perkotaan, dan Batas Negara
1241.UBA.002	Daerah yang dikuatkan tata kelola Smart City-nya di Wilayah Metropolitan	10	Daerah (Prov/Kab/Kota)	4.580.000.000	Direktorat Kawasan, Perkotaan, dan Batas Negara
1241.UBA.003	Daerah yang dimediasi dan diadvokasi dalam penerapan PP Perkotaan pada Wilayah Metropolitan	10	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.700.000.000	Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama
1241.UBA.004	Penataan kewilayahan dalam Negeri dalam rangka pertumbuhan ekonomi 8%	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.000.000.000	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah
1241.UBA.005	Penataan kewilayahan kawasan perbatasan dan wilayah metropolitan dalam rangka pertumbuhan ekonomi 8%	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.000.000.000	Direktorat Kawasan, Perkotaan, dan Batas Negara
6136	Pembinaan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			139.051.780.000	
6136.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah				
6136.UBA.001	Daerah yang menerapkan SPM sub urusan Bencana berdasarkan Tipologi Daerah	546	Daerah (Prov/Kab/Kota)	10.000.000.000	Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran
6136.UAB.001	Sistem Informasi Pemerintahan Bidang Administrasi Kewilayahan Dalam Mendukung Satu Data Indonesia Bidang Trantibumlinmas	1	Sistem Informasi	12.449.335.000	Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
6136.UBA.002	Daerah yang menerapkan SPM sub urusan Kebakaran berdasarkan Tipologi Daerah	546	Daerah (Prov/Kab/Kota)	82.300.000.000	Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran
6136.UBA.003	Daerah yang menerapkan SPM sub urusan Trantibum berdasarkan Tipologi Daerah	546	Daerah (Prov/Kab/Kota)	28.302.445.000	Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
6136.UBA.004	Daerah yang menerapkan pengintegrasian dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	2.000.000.000	Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran
6136.UBA.005	Daerah yang menerapkan layanan pemerintah saat tanggap darurat dan pasca bencana	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	2.000.000.000	Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran
6136.UBA.006	Fasilitasi Administrasi kewilayahan dalam rangka implementasi kegiatan 3 juta rumah	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	2.000.000.000	Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama
Ditjen Bina Pemerintahan Desa				101.188.538.000	
1244	Penataan sistem pelayanan administrasi desa			50.589.380.000	
1244.UBB	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa				
1244.UBB.001	Desa yang difasilitasi dalam Inisiasi Kerja Sama Desa	600	Desa	3.000.000.000	Direktorat Fasilitasi Kerjasama, Lembaga Pemerintah Desa, Dan Badan Permusyawaratan Desa
1244.UBB.002	Desa yang difasilitasi dalam Penerapan Pelayanan Pemerintahan Desa Berbasis Digital	1.000	Desa	2.000.000.000	Direktorat Fasilitasi Kerjasama, Lembaga Pemerintah Desa, Dan Badan Permusyawaratan Desa
1244.UBB.003	Desa yang menerapkan pengelolaan keuangan desa berbasis digital	20.000	Desa	6.000.000.000	Direktorat Fasilitasi Perencanaan, Keuangan, dan Aset Pemerintahan Desa
1244.UBB.005	Desa yang menerapkan sistem informasi desa berbasis Prodeskel/Epdeskel dalam perencanaan dan Pelaporan	20.000	Desa	1.000.000.000	Direktorat Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa, Data dan Evaluasi Perkembangan Desa
1244.UBB.006	Desa yang telah tertib administrasi pengelolaan aset desa	1.000	Desa	2.000.000.000	Direktorat Fasilitasi Perencanaan, Keuangan, dan Aset Pemerintahan Desa

KODE	UKE I/ PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO	TARGET		PAGU ALOKASI (Rp.)	UKE II
		VOLUME	SATUAN		
1244.UBB.008	Desa yang dokumen perencanaannya diselaraskan dengan dokumen perencanaan daerah dan nasional	500	Desa	1.000.000.000	Direktorat Fasilitas Perencanaan, Keuangan, dan Aset Pemerintahan Desa
1244.UBB.009	Desa yang telah memiliki peta batas Desa dan tertuang dalam Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang peta batas desa	1.500	Desa	33.440.000.000	Direktorat Fasilitas Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa
1244.UBB.010	Desa yang melaksanakan pembinaan kelembagaan Posyandu	2.100	Desa	2.149.380.000	Direktorat Fasilitas Lembaga Masyarakat dan Adat Desa, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, dan Pos Pelayanan Terpadu
1248	Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur/pengurus Kelembagaan Desa			44.099.158.000	
1248.UBB	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa				
1248.UBB.001	Desa yang memanfaatkan LMS dalam pembelajaran digital dalam peningkatan kapasitas Aparatur/Pengurus Kelembagaan Desa	20.000	Desa	5.000.000.000	Direktorat Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa, Data dan Evaluasi Perkembangan Desa
1248.UAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara				
1248.UAC.004	Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Masyarakat Desa Lingkup Regional	5.760	Orang	39.099.158.000	Balai Pemerintahan Desa
6138	Penataan kelembagaan Desa			6.500.000.000	
6138.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga				
6138.QDB.001	Fasilitasi lembaga posyandu dalam pelaksanaan 6 bidang SPM	9.500	Lembaga	6.500.000.000	Direktorat Fasilitas Lembaga Masyarakat dan Adat Desa, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, dan Pos Pelayanan Terpadu
Ditjen Bina Pembangunan Daerah				52.700.000.000	
1254	Fasilitasi Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah			6.800.000.000	
1254.PBL	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan				
1254.PBL.001	Rekomendasi perencanaan pembangunan daerah yang menerapkan partisipasi masyarakat	38	Rekomendasi Kebijakan	1.000.000.000	Direktorat Perencanaan Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah
1254.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah				
1254.UBA.001	Daerah yang menerapkan SIPD bidang perencanaan pembangunan daerah	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	4.000.000.000	Direktorat Perencanaan Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah
1254.UBA.002	Daerah yang difasilitasi dalam sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi di Daerah	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.800.000.000	Direktorat Perencanaan Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah
6139	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah			45.900.000.000	
6139.PBL	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan				
6139.PBL.001	Rekomendasi Ketepatan Pembagian Urusan Wajib Pelayanan Dasar	6	Rekomendasi Kebijakan	3.000.000.000	Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II
6139.PBL.002	Rekomendasi Ketepatan Pembagian Urusan Wajib non-Pelayanan Dasar	10	Rekomendasi Kebijakan	4.000.000.000	Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV
6139.PBL.003	Rekomendasi Ketepatan Pembagian Urusan Pilihan	8	Rekomendasi Kebijakan	3.200.000.000	Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I
6139.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah				
6139.UBA.001	Daerah yang melaksanakan Peningkatan mutu dan layanan SPM	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	2.700.000.000	Sekretariat Ditjen Bina Pembangunan Daerah
6139.UBA.002	Daerah yang menerapkan manajemen sistem pengaduan pelayanan SPM	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.000.000.000	Sekretariat Ditjen Bina Pembangunan Daerah
6139.UBA.003	Daerah yang menerapkan tata kelola persampahan	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	2.000.000.000	Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II
6139.UBA.004	Daerah yang difasilitasi dalam percepatan dan pengendalian pelaksanaan PBG berketahanan bencana	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.000.000.000	Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II
6139.UBA.100	Daerah yang dievaluasi rancangan Perda Tata Ruangnya	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.000.000.000	Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II
6139.UBA.101	Daerah yang Menerapkan Perencanaan dan Penganggaran Energi Baru Terbarukan (EBT)	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.000.000.000	Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I
6139.UBA.200	Daerah yang difasilitasi dalam penerapan SPM urusan Pekerjaan Umum berdasarkan Tipologi Daerah	546	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.000.000.000	Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II
6139.UBA.201	Daerah yang difasilitasi dalam penerapan SPM urusan Perumahan Rakyat berdasarkan Tipologi Daerah	546	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.000.000.000	Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II
6139.UBA.202	Daerah yang menyusun rencana Aksi keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	9	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.000.000.000	Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II
6139.UBA.203	Fasilitasi Penguatan Kapasitas Pemda dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Jalan	33	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.500.000.000	Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II
6139.UBA.204	Daerah yang menerapkan kebijakan tata kelola air minum, sanitasi, perumahan dan kawasan permukiman	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.000.000.000	Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II
6139.UBA.205	Daerah yang difasilitasi dalam Penguatan tata kelola digitalisasi pemerintah daerah	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.000.000.000	Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II
6139.UBA.300	Daerah yang difasilitasi dalam penerapan SPM urusan Kesehatan berdasarkan Tipologi Daerah	546	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.000.000.000	Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III
6139.UBA.301	Daerah yang difasilitasi dalam penerapan SPM urusan Sosial berdasarkan Tipologi Daerah	546	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.000.000.000	Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III
6139.UBA.302	Daerah yang difasilitasi dalam penerapan SPM urusan Trantibumlinmas berdasarkan Tipologi Daerah	546	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.000.000.000	Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III
6139.UBA.303	Provinsi yang menyusun dan menerapkan rencana aksi destinasi wisata	3	Daerah (Prov/Kab/Kota)	5.500.000.000	Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III
6139.UBA.304	Daerah yang difasilitasi dalam Penguatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.500.000.000	Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III
6139.UBA.305	Daerah yang menerapkan konvergensi pencegahan dan penurunan stunting di daerah	546	Daerah (Prov/Kab/Kota)	500.000.000	Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III
6139.UBA.400	Daerah yang difasilitasi dalam penerapan SPM urusan Pendidikan berdasarkan Tipologi Daerah	546	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.000.000.000	Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV
6139.UBA.401	Daerah yang mengimplementasikan kebijakan daerah tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi	11	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.500.000.000	Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV
6139.UBA.403	Daerah yang dievaluasi dalam penerapan Prov/Kabupaten/Kota Layak Anak	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.000.000.000	Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV
6139.UBA.404	Daerah yang menerapkan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG)	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.000.000.000	Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV
6139.UBA.405	Daerah yang menerapkan layanan perlindungan Perempuan dan Anak serta perlindungan dari kekerasan dan TPPO	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.000.000.000	Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV

KODE	UKE I/ PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO	TARGET		PAGU ALOKASI (Rp.)	UKE II
		VOLUME	SATUAN		
6139.UBA.406	Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Rencana Induk Urusan Pemuda dan Olahraga	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.000.000.000	Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV
6139.UBA.407	Daerah yang menetapkan Upah Minimum Provinsi	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.500.000.000	Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV
6139.UBA.408	Daerah yang difasilitasi dalam Peningkatan Budaya Gemar Membaca	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.000.000.000	Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV
6139.UBA.409	Daerah yang difasilitasi dalam penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Terintegrasi Kesehatan Reproduksi untuk mendukung penurunan Angka Kematian Ibu (AKI)	18	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.000.000.000	Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV
Ditjen Otonomi Daerah				53.721.258.000	
1259	Fasilitasi Penataan daerah, otonomi khusus/istimewa			22.631.970.000	
1259.PAC	Peraturan Pemerintah				
1259.PAC.001	Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Kawasan Aglomerasi	1	PP/RPP	520.000.000	Direktorat Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan DPOD
1259.PBL	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan				
1259.PBL.001	Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Sengketa di DOB	4	Rekomendasi Kebijakan	4.500.000.000	Direktorat Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan DPOD
1259.PBL.002	Rekomendasi Model Ideal Penataan Daerah dalam rangka Revisi UU No. 23 Tahun 2014	1	Rekomendasi Kebijakan	1.000.000.000	Direktorat Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan DPOD
1259.PBL.003	Rekomendasi Kebijakan Terkait DPOD	4	Rekomendasi Kebijakan	2.911.970.000	Direktorat Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan DPOD
1259.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah				
1259.UBA.001	Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penguatan Kapasitas dan Kinerja Daerah Bersifat Kekhususan dan Keistimewaan	10	Daerah (Prov/Kab/Kota)	13.700.000.000	Direktorat Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan DPOD
1261	Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			7.689.288.000	
1261.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah				
1261.UBA.001	Provinsi yang berkinerja tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (EPPD)	11	Daerah (Prov/Kab/Kota)	6.433.680.000	Direktorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah
1261.UBA.002	Kabupaten/kota yang berkinerja tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)	60	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.255.608.000	Direktorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah
3991	Pembinaan Produk Hukum Daerah dan Desa			15.500.000.000	
3991.PBL	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan				
3991.PBL.001	Rekomendasi simplifikasi, harmonisasi, dan sinkronisasi peraturan perizinan di daerah	2	Rekomendasi Kebijakan	2.500.000.000	Direktorat Produk Hukum Daerah
3991.QMA	Data dan Informasi Publik				
3991.QMA.001	Database Peraturan Daerah yang terintegrasi	1	layanan	5.000.000.000	Direktorat Produk Hukum Daerah
3991.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah				
3991.UBA.001	Daerah yang difasilitasi dalam penguatan kualitas Rancangan Perda dan Perkada yang telah sesuai dengan hasil review Kemendagri	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	4.000.000.000	Direktorat Produk Hukum Daerah
3991.UBA.002	Daerah yang memiliki Skor Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Perda berkategori Sangat Baik	17	Daerah (Prov/Kab/Kota)	4.000.000.000	Direktorat Produk Hukum Daerah
6140	Pembinaan Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah			7.900.000.000	
6140.PBL	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan				
6140.PBL.001	Rekomendasi kebijakan penguatan kelembagaan dan kepegawaian perangkat daerah dalam rangka Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	2	Rekomendasi Kebijakan	1.500.000.000	Direktorat Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah
6140.PBL.003	Rekomendasi Kebijakan Masukan Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah	1	Rekomendasi Kebijakan	2.000.000.000	Sekretariat Ditjen Otonomi Daerah
6140.PBL.004	Rekomendasi Model Ideal Perangkat Daerah dalam rangka Revisi UU No. 23 Tahun 2014	1	Rekomendasi Kebijakan	2.000.000.000	Direktorat Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah
6140.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah				
6140.UBA.001	Evaluasi Efektivitas Perangkat Daerah berdasarkan PP Perangkat Daerah eksisting	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	2.400.000.000	Direktorat Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah
Ditjen Bina Keuangan Daerah				73.064.000.000	
1276	Pembinaan dan Fasilitasi Dana Transfer dan Pembiayaan Daerah			4.750.000.000	
1276.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah				
1276.UBA.001	Daerah Yang Difasilitasi Dalam Menerbitkan Obligasi Daerah/Sukuk Daerah	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.750.000.000	Direktorat Fasilitasi Transfer dan Pembiayaan Utang Daerah
1276.UBA.002	Daerah Yang Difasilitasi Dalam Memanfaatkan Pinjaman Daerah	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	3.000.000.000	Direktorat Fasilitasi Transfer dan Pembiayaan Utang Daerah
6141	Pembinaan Pengelolaan Keuangan, Badan Usaha/Layanan, dan Barang Milik Daerah			68.314.000.000	
6141.PBL	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan				
6141.PBL.001	Rekomendasi Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai Masukan Revisi UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	1	Rekomendasi Kebijakan	1.000.000.000	Ditjen Bina Keuangan Daerah
6141.PBL.002	Rekomendasi Penyusunan Rancangan Undang-Undang BUMD	1	Rekomendasi Kebijakan	850.000.000	Direktorat BUMD, BLUD dan Barang Milik Daerah
6141.QMA	Data dan Informasi Publik				
6141.QMA.001	Peta Jalan Belanja Pegawai Di Daerah	1	layanan	5.100.000.000	Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah
6141.QMA.002	Basis Data Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1	layanan	7.200.000.000	Direktorat Pendapatan Daerah
6141.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah				
6141.UBA.011	Provinsi Yang Memenuhi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	29	Daerah (Prov/Kab/Kota)	6.100.000.000	Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah
6141.UBA.013	Daerah Yang Melaksanakan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU)	420	Daerah (Prov/Kab/Kota)	2.650.000.000	Direktorat Pendapatan Daerah
6141.UBA.014	Daerah Dengan Proporsi Kontribusi BUMD Meningkat Dalam APBD	360	Daerah (Prov/Kab/Kota)	20.134.000.000	Direktorat BUMD, BLUD dan Barang Milik Daerah
6141.UBA.015	Daerah Yang Melakukan Penatausahaan Barang Milik Daerah Secara Wajar	510	Daerah (Prov/Kab/Kota)	8.630.000.000	Direktorat BUMD, BLUD dan Barang Milik Daerah
6141.UBA.017	Daerah yang Difasilitasi Dalam Rangka Penerapan Cashless/Transaksi Non Tunai atas Pengeluaran Daerah	220	Daerah (Prov/Kab/Kota)	3.825.000.000	Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
6141.UBA.018	Daerah yang Difasilitasi Dalam Rangka Penerapan Cashless/Transaksi Non Tunai atas Penerimaan Daerah	220	Daerah (Prov/Kab/Kota)	3.825.000.000	Direktorat Pendapatan Daerah
6141.UBA.019	Daerah Dengan Proporsi Pajak Daerah Terhadap PAD Meningkat	360	Daerah (Prov/Kab/Kota)	5.500.000.000	Direktorat Pendapatan Daerah
6141.UBA.020	Daerah Dengan Proporsi Retribusi Daerah Terhadap PAD Meningkat	360	Daerah (Prov/Kab/Kota)	3.500.000.000	Direktorat Pendapatan Daerah

KODE	UKE I/ PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO	TARGET		PAGU ALOKASI (Rp.)	UKE II
		VOLUME	SATUAN		
Badan Strategi	Kebijakan Dalam Negeri			6.115.000.000	
1283	Pembinaan inovasi daerah			4.250.000.000	
1283.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah				
1283.UBA.001	Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Pilot Project Inovasi Tematik	2	Daerah (Prov/Kab/Kota)	2.000.000.000	Pusat Strategi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, dan Inovasi Pemerintahan Dalam negeri
1283.UBA.002	Daerah yang difasilitasi dalam Penguatan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri	546	Daerah (Prov/Kab/Kota)	2.250.000.000	Pusat Strategi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, dan Inovasi Pemerintahan Dalam negeri
6142	Penguatan Strategi Kebijakan Bidang Pemerintahan Dalam Negeri			1.865.000.000	
6142.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah				
6142.UBA.001	Daerah dengan Indeks Tata Kelola Pemerintahan Dalam Negeri berkategori "Baik"	3	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.865.000.000	Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan dan Pelayanan Publik
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia				11.065.059.000	
1285	Pengembangan dan Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi			4.900.000.000	
1285.PBL	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan				
1285.PBL.001	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri berdasarkan Kapasitas Daerah Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur	11	Rekomendasi Kebijakan	3.000.000.000	Pusat Standarisasi dan Sertifikasi
1285.PFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria				
1285.PFA.001	Standarisasi Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri	19	NSPK	1.900.000.000	Pusat Standarisasi dan Sertifikasi
6144	Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri			6.165.059.000	
6144.UAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara				
6144.UAC.002	Aparatur yang mengikuti pengembangan Kompetensi Perencanaan dan Penganggaran SPM	210	Orang	1.024.348.000	Pusat Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri
6144.UAC.003	Camat yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajemen Strategi Pembangunan	300	Orang	1.301.530.000	Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen Kepemimpinan
6144.UAC.004	Aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi pengelolaan keuangan daerah	570	Orang	2.266.624.000	Pusat Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri
6144.UAC.005	Aparatur yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Penyusunan Perda dan Perkada	210	Orang	551.572.000	Pusat Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis
6144.UAC.007	Pejabat Fungsional Penata Perizinan yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	510	Orang	1.020.985.000	Pusat Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis
010.CP	Program Tata Kelola Kependudukan			79.613.399.000	
Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil				79.613.399.000	
1268	Pengelolaan, Informasi dan Integrasi data Kependudukan			16.866.295.000	
1268.QAB	Pelayanan Publik kepada lembaga				
1268.QAB.001	Lembaga pengguna yang terkoneksi dengan data warehouse kependudukan berbasis NIK Nasional	1.375	Lembaga	14.852.000.000	Direktorat Integrasi Data Kependudukan Nasional
1268.QMA	Data dan Informasi Publik				
1268.QMA.001	Integrasi Data Sosial Ekonomi dengan Adminduk dan Statistik Hayati	1	layanan	703.000.000	Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
1268.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah				
1268.UBA.001	Daerah Yang Difasilitasi Dalam Pembentukan Data Kelahiran, Kematian, Perkawinan, dan Perceraian Yang Terintegrasi Antar Lembaga	45	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.311.295.000	Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
1269	Pembinaan Administrasi Kependudukan			3.370.280.000	
1269.PBM	Kebijakan Bidang Pelayanan Publik				
1269.PBM.001	Rekomendasi Kebijakan masukan Revisi undang - undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan	1	Rekomendasi Kebijakan	1.000.000.000	Sekretariat Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1269.QAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat				
1269.QAA.001	Akta Kelahiran yang diterbitkan	745.000	Akta	546.500.000	Direktorat Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
1269.QAA.002	Akta Kematian yang diterbitkan	425.000	Akta	224.000.000	Direktorat Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
1269.QAA.003	Akta Perkawinan yang diterbitkan	1.360.364	Akta	315.000.000	Direktorat Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
1269.QAA.004	Akta Perceraian yang diterbitkan	50.487	Akta	315.000.000	Direktorat Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
1269.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah				
1269.UBA.001	Fasilitasi penerapan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) secara inklusif	15	Daerah (Prov/Kab/Kota)	969.780.000	Direktorat Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
6997	Penguatan Administrasi Kependudukan dan Identitas Digital			59.376.824.000	
6997.PAD	Peraturan Presiden				
6997.PAD.S01	Peraturan Presiden mengenai Identitas Kependudukan Digital	1	Peraturan Presiden	440.000.000	Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6997.UAB	Sistem Informasi Pemerintahan				
6997.UAB.001	Aplikasi ID digital	1	Sistem Informasi	58.936.824.000	Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
010.CR	Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum			170.339.125.000	
Ditjen Politik Dan Pemerintahan Umum				170.339.125.000	
1233	Penguatan Ketahanan Ideologi, Ekonomi, Sosial, dan Budaya			15.600.000.000	
1233.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat				
1233.QDC.001	Internalisasi Nilai Nasionalisme Bagi Generasi Muda Dalam Menggelorakan Nilai Pancasila serta Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa	3.000	Orang	3.000.000.000	Direktorat Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan
1233.UAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara				
1233.UAC.001	Fasilitasi Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Menjaga Persatuan dan Kesatuan NKRI Bagi Aparatur	2.000	Orang	2.000.000.000	Direktorat Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan
1233.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah				
1233.UBA.001	Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Prekursor Narkotika.	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.500.000.000	Direktorat Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya
1233.UBA.002	Fasilitasi Pembinaan Kerukunan Antar dan Intra Suku, Umat Beragama, Penghayat Kepercayaan, Ras dan Golongan	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	2.250.000.000	Direktorat Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya
1233.UBA.003	Fasilitasi Penguatan Karakter dan Wawasan Kebangsaan dalam Membangun Harmoni Kebangsaan untuk Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	4.100.000.000	Direktorat Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan
1233.UBA.004	Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial (PKS) di daerah melalui Tim terpadu	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	2.750.000.000	Direktorat Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya
1234	Peningkatan Kewaspadaan Nasional			4.500.000.000	

KODE	UKE I/ PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO	TARGET		PAGU ALOKASI (Rp.)	UKE II
		VOLUME	SATUAN		
1234.UAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara				
1234.UAC.001	Kapasitas aparatur pusat dan daerah di bidang kewaspadaan dini dan deteksi dini	300	Orang	4.500.000.000	Direktorat Kewaspadaan Nasional
6145	Pembinaan Politik Dalam negeri dan Organisasi Kemasyarakatan			150.239.125.000	
6145.PBC	Kebijakan Bidang Politik				
6145.PBC.001	Kebijakan Bidang Politik Dalam Negeri	2	Rekomendasi Kebijakan	3.000.000.000	Direktorat Politik Dalam Negeri
6145.PBC.002	Rekomendasi Kebijakan Pertimbangan Urgensi terhadap Dana Abadi Organisasi Kemasyarakatan	1	Rekomendasi Kebijakan	1.250.000.000	Direktorat Organisasi Kemasyarakatan
6145.PEB	Forum				
6145.PEB.001	Pengembangan Literasi Politik Masyarakat	20	forum	3.900.000.000	Direktorat Politik Dalam Negeri
6145.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga				
6145.QDB.001	Fasilitasi Penguatan Tata Kelola Partai Politik	8	Lembaga	1.100.000.000	Direktorat Politik Dalam Negeri
6145.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat				
6145.QDC.001	Pendidikan politik dan penguatan ideologi Pancasila bagi pengurus parpol	6.000	Orang	750.000.000	Direktorat Politik Dalam Negeri
6145.QDC.002	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Manajemen Pengurus Organisasi Kemasyarakatan	3.450	Orang	2.950.000.000	Direktorat Organisasi Kemasyarakatan
6145.QEI	Bantuan Lembaga				
6145.QEI.001	Bantuan Keuangan ke Partai Politik	8	Lembaga	134.489.125.000	Direktorat Politik Dalam Negeri
6145.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah				
6145.UBA.001	Fasilitasi penguatan demokrasi di daerah	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.300.000.000	Direktorat Politik Dalam Negeri
6145.UBA.002	Fasilitasi Penguatan Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia Tingkat Provinsi	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.500.000.000	Direktorat Politik Dalam Negeri
010.WA	Program Dukungan Manajemen			98.472.772.000	
	Sekretariat Jenderal			47.057.071.000	
6085	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Sekretariat Jenderal			47.057.071.000	
6085.UAB	Sistem Informasi Pemerintahan				
6085.UAB.001	Optimalisasi Penerapan SIPD sebagai Platform Tunggal Pemerintahan di Daerah	1	Sistem Informasi	47.057.071.000	Sekretariat Jenderal
	Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu			51.415.701.000	
4255	Kegiatan Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu			51.415.701.000	
4255.QAH	Pelayanan Publik Lainnya				
4255.QAH.001	Layanan Penanganan Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu	1	layanan	44.188.095.000	Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
4255.QAB.001	Layanan Penilaian Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu	76	Lembaga	7.227.606.000	Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM

PAGU DIREKTIF PRESIDEN TA.2026

UKE I/RO	TARGET (VOLUME)	SATUAN	PAGU ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	Direktif Presiden
01 SETJEN			1.182.451.867.000	
6084.EBD.002 Layanan Penyusunan Dokumen Implementasi SAKIP, Manajemen Kinerja dan Penugasan Lainnya Bidang Monitoring dan Evaluasi lingkup Kemendagri	1	Dokumen	1.005.038.585.000	Pertumbuhan Ekonomi
6083.AEC.002 Kerjasama Luar Negeri	18	Kesepakatan	100.000.000.000	Pertumbuhan Ekonomi
6084.EBA.005 Layanan Ketatausahaan dan Koordinasi Tugas Pimpinan	1	Layanan	77.413.282.000	Pertumbuhan Ekonomi
02 ITJEN			9.298.798.000	
6098.BIE.001 PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH INSPEKTORAT JENDERAL	38	Pemerintah Daerah	2.541.370.000	Pengendalian Inflasi
6098.FBA.002 Pengawasan Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi di Daerah	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	6.757.428.000	Pengendalian Inflasi
03 POLPUM			19.000.000.000	
1233.FBA.001 Komunikasi Sosial Masyarakat dan pembahasan isu strategis Bidang Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan Dalam Menjaga Keutuhan NKRI	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	2.500.000.000	Sekolah Garuda
6145.AEB.001 Komunikasi sosial masyarakat dan penanganan isu-isu strategis/aktual bidang organisasi masyarakat	18	forum	2.750.000.000	Pertumbuhan Ekonomi
1233.FAC.001 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pusat dan Daerah di Bidang Intelijen Ekonomi	150	Orang	2.250.000.000	Pertumbuhan Ekonomi
1233.FBA.002 Komunikasi Sosial dan Pembahasan isu-isu strategis bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	2.000.000.000	Pengendalian Inflasi
6145.FBA.006 Konsolidasi Nasional Guna Menciptakan Stabilitas Politik untuk Mendukung Pelaksanaan Asta Cita	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	7.000.000.000	Pertumbuhan Ekonomi
1233.FBA.006 Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN)	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	2.500.000.000	Sekolah Rakyat
04 ADWIL			24.100.000.000	
1241.FBA.001 Fasilitasi Kegiatan Strategis Program Percepatan Direktif Presiden	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	24.100.000.000	Pertumbuhan Ekonomi
05 PEMDES			19.500.000.000	
6138.BDB.002 Lembaga PKK yang tertata	5000	Lembaga	15.000.000.000	Makan Bergizi Gratis
6138.BDB.004 Fasilitasi Lembaga Posyandu dalam Ketahanan Sosial	4500	Lembaga	4.500.000.000	Pembangunan 3 Juta Rumah
06 BANGDA			11.500.000.000	
6139.FBA.104 Daerah yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Perhutanan Sosial	27	Daerah (Prov/Kab/Kota)	500.000.000	Pertumbuhan Ekonomi
6139.FBA.300 Daerah yang difasilitasi dalam Peningkatan Kinerja Kabupaten/Kota dalam Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	514	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.000.000.000	Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
6139.FBA.301 Daerah yang melaksanakan pengembangan UMKM, Seni dan Kerajinan Nasional (DEKRANAS)	15	Daerah (Prov/Kab/Kota)	6.000.000.000	Pertumbuhan Ekonomi
6139.FBA.306 Daerah yang difasilitasi dalam Pembentukan Koperasi Merah Putih	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.000.000.000	Koperasi Merah Putih
6139.FBA.307 Daerah yang difasilitasi dalam Pembentukan sekolah rakyat	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.000.000.000	Sekolah Rakyat
6139.FBA.308 Daerah yang difasilitasi dalam pengendalian penyakit dan Peningkatan Kesehatan	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.000.000.000	Cek Kesehatan Gratis
6139.FBA.400 Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Kebijakan Ketenagakerjaan	28	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.000.000.000	Pertumbuhan Ekonomi
08 DUKCAPIL			228.174.729.000	
1269.BAA.001 Blangko KTP-el untuk daerah	22000000	Keping	226.059.134.000	Cek Kesehatan Gratis
1244.FBB.104 Pembangunan 3 Juta Rumah	552	Daerah (Prov/Kab/Kota)	2.115.595.000	Pembangunan 3 Juta Rumah
09 KEUDA			38.449.557.000	
1276.FBA.001 Daerah yang Optimal Dalam Memanfaatkan Dana Transfer	496	Daerah (Prov/Kab/Kota)	8.000.000.000	Pertumbuhan Ekonomi
6141.FBA.021 Provinsi Yang Difasilitasi Dalam Penyusunan APBD	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	2.060.000.000	Pertumbuhan Ekonomi
6141.FBA.022 Provinsi Yang Memenuhi Anggaran SPM	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	550.000.000	Pertumbuhan Ekonomi
6141.FBA.023 Daerah Yang Menerapkan SIPD Bidang Keuangan Daerah	546	Daerah (Prov/Kab/Kota)	7.500.000.000	Pertumbuhan Ekonomi
6141.FBA.024 Provinsi Yang Difasilitasi Dalam Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.200.000.000	Pengendalian Inflasi
6141.FBA.025 Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penyusunan LKPD	500	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.450.000.000	Pertumbuhan Ekonomi
6141.FBA.027 Provinsi Yang Difasilitasi Dalam Pencapaian Realisasi Belanja secara Optimal	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.750.000.000	Pertumbuhan Ekonomi
6141.FBA.028 Daerah yang Menerapkan PPK BLUD	546	Daerah (Prov/Kab/Kota)	5.923.557.000	Pertumbuhan Ekonomi
6141.FBA.029 Daerah Yang Difasilitasi Dalam Pemenuhan dan Penginputan Data Perhitungan IPKD	546	Daerah (Prov/Kab/Kota)	5.000.000.000	Pertumbuhan Ekonomi
6141.FBA.030 Fasilitasi Isu Aktual Pengelolaan Keuangan Daerah	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	3.000.000.000	Pertumbuhan Ekonomi
6141.AAG.D01 Permendagri Bidang Perencanaan Anggaran Daerah	1	PerMen	200.000.000	Pertumbuhan Ekonomi
6141.AAG.D02 Permendagri Bidang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	1	PerMen	200.000.000	Pengendalian Inflasi
6141.AAG.D03 Permendagri Bidang Pendapatan Daerah	1	PerMen	200.000.000	Pertumbuhan Ekonomi
6141.AAG.D04 Permendagri Bidang Pengelolaan BMD	1	PerMen	200.000.000	Pertumbuhan Ekonomi
6141.AAG.D05 Permendagri Bidang Pengelolaan BLUD	1	PerMen	200.000.000	Pertumbuhan Ekonomi
6141.AAG.D06 Permendagri Restrukturisasi BUMD	1	PerMen	200.000.000	Pertumbuhan Ekonomi

UKE I/RO	TARGET (VOLUME)	SATUAN	PAGU ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	Direktif Presiden
6141.AAG.D07 Permendagri Pinjaman BUMD	1	PerMen	200.000.000	Pertumbuhan Ekonomi
6141.AAG.D08 Permendagri Pembinaan BUMD	1	PerMen	200.000.000	Pertumbuhan Ekonomi
6141.AAG.D09 PERMENDAGRI BIDANG PENGELOLAAN BUMD	1	PerMen	200.000.000	Pertumbuhan Ekonomi
6141.AAH.F01 Kepmendari Bidang Pengelolaan BUMD	6	peraturan	216.000.000	Pertumbuhan Ekonomi
11 BSKDN			13.925.000.000	
1244.FBB.101 Pertumbuhan Ekonomi	6	Daerah (Prov/Kab/Kota)	10.012.500.000	Pertumbuhan Ekonomi
1244.FBB.102 Pengendalian Inflasi	6	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.050.000.000	Pengendalian Inflasi
1244.FBB.103 Makan Bergizi Gratis	3	Daerah (Prov/Kab/Kota)	450.000.000	Makan Bergizi Gratis
1244.FBB.104 Pembangunan 3 Juta Rumah	2	Daerah (Prov/Kab/Kota)	300.000.000	Pembangunan 3 Juta Rumah
1244.FBB.105 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	2	Daerah (Prov/Kab/Kota)	300.000.000	Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
1244.FBB.108 Swasembada dan Lumbung Pangan	4	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.212.500.000	Swasembada dan Lumbung Pangan
1244.FBB.109 Cek Kesehatan Gratis	2	Daerah (Prov/Kab/Kota)	300.000.000	Cek Kesehatan Gratis
1244.FBB.112 Penanganan Sampah	2	Daerah (Prov/Kab/Kota)	300.000.000	Penanganan Sampah
12 BPSDM			16.000.000.000	
1285.FBA.101 Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam mendukung Program Direktif Presiden Pertumbuhan Ekonomi	350	Daerah (Prov/Kab/Kota)	16.000.000.000	Pertumbuhan Ekonomi
Jumlah			1.562.399.951.000	